

**DAMPAK POLITIK PASIFIKASI BELANDA TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT ACEH ABAD XX**

*THE IMPACT OF DUTCH PACIFICATION POLITIC TOWARDS
SOCIAL-CULTURAL LIFE OF ACEHNESE IN XX*

Sudirman

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh
Jln. Tuwanku Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Pos-el: sudiraceh71@gmail.com

Naskah diterima 2-5-2021 Naskah direvisi 02-06-2021 Naskah disetujui 20-6-2021

ABSTRACT

*This study aims to explain the positive impacts of Dutch pacification politics in economic and education and the responses of Acehnese towards the fight against Dutch colonialism. This study used a critical method by doing library research in collecting the data. The data was collected from Aceh Documentation and Information Center. Among the data source was *Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie over 1921 en 1922*. *De Deli Courant*, *Koloniaal Verslag* and *Mailr (Mail Rapporten)*. These archives gave adequate information on the implementation of pacification politics in Aceh. The secondary source was collected through readings in the library of Cultural Values Preservation Office of Aceh and personal collection. The study showed that Dutch pacification politics affected the social life of Acehnese people since it showed a better condition in its economic and education field. However, the Dutch failed to rule Aceh against the people's fought until the Dutch departure in 1942.*

Keywords: *pacification, economic, education*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak politik pasifikasi di bidang ekonomi dan pendidikan serta sikap masyarakat Aceh terhadap perjuangan melawan Belanda. Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah kritis dengan teknik pencarian sumber melalui bacaan sejumlah arsip dan buku. Penelusuran arsip dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Di antara sumber arsip yang diteliti adalah *Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie over 1921 en 1922*. *De Deli Courant*, *Koloniaal Verslag*, serta *Mailr (Mail Rapporten)*. Arsip ini banyak memberikan informasi tentang pelaksanaan politik pasifikasi di Aceh. Sumber sekunder dikumpulkan melalui sejumlah bacaan di perpustakaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh dan buku-buku koleksi penulis. Berdasar pada data yang diperoleh dari kajian ini disimpulkan bahwa politik pasifikasi Belanda berdampak pada kehidupan sosial-budaya masyarakat Aceh karena ekonomi dan pendidikan masyarakat menjadi bertambah baik. Namun, pemerintah Belanda tetap tidak berhasil menguasai Aceh sepenuhnya karena rakyat Aceh tetap melakukan perlawanan hingga Belanda meninggalkan Aceh pada tahun 1942.

Kata Kunci: pasifikasi, ekonomi, pendidikan

PENDAHULUAN

Perlawanan terhadap penjajahan Belanda terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Aceh semenjak tahun 1873

hingga masuk penjajahan Jepang awal tahun 1942 (Veer, 1985: 293). Perlawanan yang dilakukan oleh Rakyat Aceh dalam berbagai bentuk dan berbagai tempat di seluruh Aceh. Akibatnya, kedua belah pihak mengalami

kerugian besar, baik harta maupun jiwa. Bukti paling monumental tentang perang Belanda di Aceh adalah pemakaman Belanda (*kerkhof*) yang terletak di Banda Aceh. Di sana dimakamkan ribuan serdadu Belanda, belum lagi di berbagai tempat di seluruh Aceh (Geerts, 2007: 2).

Berbagai cara dilakukan oleh pihak Belanda untuk menghentikan perlawanan rakyat Aceh, misalnya, pada abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20 dibentuk sebuah pasukan khusus *Marsose*. Anggota pasukan ini direkrut dari berbagai kesatuan tentara Belanda yang dinilai memiliki daya tempur tinggi dan pemberani. Tugas khusus pasukan ini adalah memburu orang Aceh yang melawan Belanda di semua wilayah Aceh. Setiap orang Aceh yang tertangkap karena melawan Belanda, langsung dibunuh (Struyvenberg, 1930: 35).

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda tidak menyurutkan perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, perlawanan rakyat Aceh semakin meningkat. Pejuang Aceh tidak lagi secara berkelompok, tetapi secara bergerilya, bahkan secara sendirian menikam setiap orang Belanda yang dijumpai. Cara perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Aceh seperti itu dikenal dengan sebutan *Atjeh Moorden* atau *Het een Typische Atjeh Moord* (pembunuhan Aceh) atau *gekke Atjehsche* (=orang Aceh gila) (Jongejans, 1939: 316). Orang Aceh sendiri menyebutnya *poh kaphe* (=membunuh kafir).

Pemerintah Belanda beranggapan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya untuk melemahkan perjuangan rakyat Aceh dianggap tidak berhasil, sehingga pada awal abad ke-20, mereka mengubah kebijakan dalam cara menguasai Aceh. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh, pemerintah Belanda kehabisan cara, sehingga terpaksa meminta nasihat kepada seorang orientalis terkemuka pada masa itu, yaitu Christian Snouck Hurgronje. Mereka

melakukan suatu kebijaksanaan baru yang disebut politik pasifikasi, yaitu usaha perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial-budaya masyarakat Aceh, seperti perbaikan perekonomian dan pendidikan (Sufi dkk., 2008: 4).

Pemerintah kolonial berasumsi, apabila perekonomian masyarakat berkembang maka kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. Hal itu dapat berakibat pada keamanan dan kenyamanan di setiap wilayah lebih terjaga. Apabila keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat terjaga maka masyarakat tidak lagi membenci atau melawan kolonial dan masyarakat akan terobati dari kesengsaraan karena berperang melawan kolonial yang sudah berlarut-larut. Dengan demikian, yang dikehendaki adalah supaya masyarakat dapat menghentikan perlawanan terhadap kolonial secara permanen (*Mailr.*, 2398/18).

Namun, dalam kenyataannya, meskipun pihak Belanda menerapkan kebijakan pasifikasi, rakyat Aceh masih saja melakukan perlawanan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana dampak politik pasifikasi terhadap pendidikan dan ekonomi rakyat Aceh? *Kedua*, bagaimana dampak politik pasifikasi terhadap perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda? Permasalahan ini ditulis supaya mengetahui akar permasalahan dan kekuatan masyarakat Aceh dalam melawan Belanda.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode historis berdasar pada sumber primer, seperti *Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie over 1921 en 1922*. 1924. *De Deli Courant*, *Koloniaal Verslag*, dan *Mailr (Mail Rapporten)* dan sumber sekunder. *Tahap pertama* adalah pengumpulan sumber. Teknik pengumpulan sumber dilakukan melalui studi pustaka. Pengumpulan sumber primer dan sekunder dilakukan melalui sejumlah bacaan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh dan di perpustakaan Balai Pelestarian

Nilai Budaya Provinsi Aceh dan buku-buku koleksi penulis. *Tahap kedua* adalah memverifikasi sumber yang sudah diperoleh untuk menentukan keabsahan dan keaslian (Pranoto, 2010: 36-37). Verifikasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan sumber yang sama dan dengan sumber yang berbeda.

Tahap ketiga adalah analisis data melalui *restatement*, deskripsi data, dan interpretasi data. *Restatement* data dilakukan dengan mengacu pada kutipan sumber. Deskripsi data dilakukan untuk menunjukkan pola data menyangkut hubungan politik pasifikasi dengan perbaikan ekonomi, pendidikan, dan sikap perlawanan rakyat Aceh. Proses interpretasi data dilakukan dengan cara sintesis, yaitu menyatukan, menafsir, dan memaknai data. Ketiga tahapan analisis tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan. *Keempat*, historiografi, yaitu menuliskan hasil penelitian dengan memperhatikan seleksi data dan kronologis peristiwa (Kuntowijoyo, 2005: 102-103). Sifat penulisan ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penulisan sejarah yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

PEMBAHASAN

Cara kekerasan yang dilakukan oleh Belanda dalam menguasai Aceh tidak berhasil, sehingga permulaan abad ke-20 mereka mengganti kebijakan dalam menguasai Aceh. Belanda membuat kebijakan baru yang dikenal dengan pasifikasi, suatu inisiatif yang disarankan oleh penasihat masalah ketimuran (Christian Snouck Hurgronje), yakni sebuah kebijakan yang lebih mengandalkan rasa persahabatan yang diwujudkan dalam semua aspek kehidupan sosial-budaya masyarakat Aceh. Melalui kebijakan itu, pemerintah Belanda pelan-pelan menunjukkan sikap secara lembut dan bersahabat dengan rakyat Aceh.

Dalam upaya menguasai Aceh, Belanda tidak hanya mengandalkan tindakan

kebrutalan, tetapi disertai cara-cara yang bersifat kemanusiaan dan menyenangkan masyarakat. Para tokoh masyarakat seperti golongan bangsawan dan masyarakat yang tidak lagi melawan serta mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan diberikan bantuan secara layak supaya dapat hidup normal lagi. Orang-orang yang mau bekerja di bidang pertanian atau perkebunan diberikan bantuan usaha dan dijamin keamanannya oleh pihak kolonial.

Di samping usaha di atas, pihak kolonial Belanda ikut memperbaiki sumber daya masyarakat Aceh. Langkah pertama yang dilakukan oleh kolonial adalah menyekolahkan putra-putri bangsawan pada sekolah-sekolah sistem Barat yang didirikan oleh kolonial. Pihak kolonial juga membenahi kesehatan masyarakat dengan obat dan cara penyembuhan yang baik serta pembangunan jalur transportasi, baik darat maupun laut. Upaya yang sangat signifikan dilakukan oleh Belanda adalah mengembangkan perekonomian rakyat dengan sistem eksploitasi dan pembangunan semua aspek sarana dan prasarana bagi keperluan masyarakat.

Dampak Ekonomi

Sejak abad ke-20, pemerintah Belanda tidak lagi mengedepankan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, namun juga dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menyenangkan masyarakat. Tindakan pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki perekonomian rakyat adalah salah satu contoh nyata dalam mengambil hati rakyat Aceh supaya tidak lagi melakukan perlawanan. Langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pada tahun 1901, pemerintah Belanda mulai melakukan perbuatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Van Heutz selaku gubernur Pemerintahan Sipil dan Militer Belanda di Aceh menugaskan

Dinas Topografi untuk memetakan perihal daerah Aceh (Langhout, 1923: 84).

Setelah Dinas Topografi melakukan pemetaan, daerah-daerah yang dianggap potensial di seluruh Aceh mulai dieksploitasi. Perkebunan sawit, karet, dan pertambangan mulai dibuka, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah kolonial Belanda. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi, seperti jalur transportasi, jembatan, dan irigasi dibangun secara besar-besaran. Di samping pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh, Belanda juga membangun pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai barat dan timur Aceh.

Pertanian sawah merupakan mata pencaharian utama masyarakat Aceh, seperti disebutkan dalam sebuah *hadih maja* (ungkapan tradisional) yang berbunyi *pangulee hareukat meugoe* (pertanian bersawah adalah usaha utama). Akibat keadaan politik menjelang akhir abad ke-19 (disebabkan peperangan yang berlangsung lama) yang melibatkan sebagian besar masyarakat maka usaha pertanian sawah menjadi terbengkalai. Kehidupan perekonomian rakyat menjadi sangat menderita karena pada umumnya kehidupan masyarakat tergantung pada hasil bersawah.

Pemerintah kolonial terus mendorong upaya peningkatan hasil usaha petani. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menyediakan modal bagi masyarakat dan bangsawan yang mau bekerja sama dengan Belanda. Untuk tujuan tersebut, pemerintah Belanda membangun perbankan di sekitar Banda Aceh, di antaranya *de Groot Atjehsche Afdeeling Bank*. Apabila masyarakat Aceh memerlukan modal usaha untuk mengembangkan perkebunan dan persawahan dianjurkan untuk mengajukan bantuan kredit pinjaman tanpa bunga dari bank tersebut.

Untuk memacu pembangunan ekonomi pertanian, pemerintah Belanda mendatangkan tenaga kerja dari Jawa dan Sunda supaya dapat memperkenalkan cara-cara pertanian yang lebih baik seperti yang dilakukan para petani di Jawa. Di Aceh, mereka memberikan contoh-

contoh cara bertani yang benar, cara mengolah tanah yang baik, cara menggunakan bajak hindustan, cara menanam, dan, memberikan pupuk serta menggunakan bibit padi jenis unggul lokal yang hasil panennya lebih baik (Koloniaal Verslag, 1907: 18).

Untuk mengairi sawah pertanian dan mengendalikan banjir, pemerintah Belanda membangun irigasi dan waduk-waduk penampungan air. Di samping itu, mereka membentuk sebuah lembaga yang tugasnya melakukan bimbingan kepada petani. Lembaga tersebut bernama *Landbouwwoorlichtingsdienst* (Lembaga Bimbingan Bidang Pertanian) (Jongejans, 1939: 187).

Jumlah areal pertanian sawah yang diusahakan dengan bantuan modal pemerintah Belanda pada tahun 1928 seluas 130.000 Ha (Mailr., 1924-1932: 46-47). Areal sawah terus meningkat pada tahun berikutnya, misalnya, pada tahun 1932 bertambah sejumlah 132.000 hektar dan pada tahun 1936 luas areal sawah meningkat dengan jumlah 140.000 hektar. Penambahan areal sawah diiringi pula dengan jumlah hasil panen yang diperoleh. Apabila pada awal abad ke-20 jumlah padi dari Aceh sekadar dapat menutupi keperluan masyarakat, tetapi perkembangan selanjutnya terutama pada sekitar tahun 1932, daerah Aceh kelebihan padi. Padi tersebut sebagiannya dikirim ke Sumatera Timur oleh pemerintah Belanda untuk memenuhi keperluan para pekerja perkebunan di daerah tersebut (*De Deli Courant*, 12 Juni 1933). Pada sekitar tahun 1939, wilayah Aceh kelebihan padi sekitar 5.600 ton dan dikirim ke Sumatera Utara (Sumatera Timur). Pada sekitar 1940 hingga 1941, kelebihan padi bertambah sekitar 24.000 ton, kemudian sekitar 1942 padi bertambah lagi menjadi 36.000 ton. Padi tersebut dikirim lagi ke Sumatera Utara dan Padang oleh pemerintah Belanda (Piekar, 1949: 24).

Padi yang diekspor ke Sumatera Utara kebanyakan merupakan hasil dari daerah pantai utara dan timur Aceh, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Padi tersebut dibawa

ke pelabuhan Ulee Lheue dengan kereta api dan jasa angkutan, untuk kemudian diangkut melalui kapal barang ke pelabuhan yang ada di Sumatera Timur. Adapun padi yang dikirim ke Padang berasal dari pantai barat Aceh, padi itu diangkut menggunakan perahu tradisional milik pengusaha lokal ke pelabuhan Ulee Lheue dan kemudian dibongkar muat atau dipindahkan ke kapal barang yang lebih besar untuk dibawa langsung ke pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat (Sufi, 1999: 5).

Di samping upaya memperbanyak hasil padi sebagai makanan pokok masyarakat, Belanda melakukan pula pembenahan-pembenahan sumber pekerjaan petani yang lain. Semenjak permulaan abad ke-20, Belanda mendorong masyarakat supaya menanam lagi tanaman kelapa, pinang, dan lada di perkebunannya. Guna membantu pekerjaan itu, Belanda juga memberikan bantuan usaha tanpa bunga bagi masyarakat jika menginginkan bantuan dana (Koloniaal Verslag 1905: 21).

Sebagaimana halnya meningkatkan hasil padi masyarakat, peningkatan hasil tanaman lada juga dilakukan dengan cara mendatangkan beragam jenis varietas bibit dari daerah Bangka atau Lampung (Langhout, 1923: 171). Untuk tujuan itu, pemerintah Belanda juga memberikan kemudahan berupa pinjaman modal pada bank-bank perkreditan rakyat. Untuk keperluan pengadaan kredit pertanian bagi para petani di Aceh Besar, pada 1916 pemerintah Belanda membangun lima buah bank perkreditan di sekitar Aceh Besar. Untuk keperluan yang sama, di Aceh Utara dan Aceh Timur dibangun bank perkreditan pada tahun 1913. Pada tahun 1918 jumlah bank perkreditan untuk menolong perekonomian rakyat di Aceh berjumlah 29 buah (Langhout, 1923: 110).

Usaha pemerintah Belanda untuk meningkatkan penanaman lada di Aceh sangat berhasil karena ekspor lada terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 1914 lada yang diekspor hingga tiga juta tiga ratus tiga kilogram biji lada *minyeuk* dan satu juta

kilogram lada *puteh*. Hasil produksi lada terus meningkat setiap tahun, misalnya, pada sekitar 1915 meningkat hingga empat juta empat puluh enam ribu kilogram lada *minyeuk* serta lada *puteh* satu juta kilogram (James, 1922: 375). Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi kemerosotan harga lada di pasaran dunia, mengakibatkan penanaman lada di Aceh mengalami kemunduran, sehingga hasil produksi lada menjadi merosot. Pada sekitar 1919, pengiriman lada ke luar negeri sekitar empat juta tiga ratus empat puluh kilogram, tetapi di tahun 1920 hanya sekitar dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu kilogram (Langhout, 1923: 120). Meskipun penanaman lada rakyat pada tahun 1920 mengalami kemunduran, tetapi penanaman pinang justru bertambah. Di beberapa wilayah di sekitar Banda Aceh, pantai utara, dan pantai timur Aceh perkebunan pinang menunjukkan peningkatan hasilnya. Pada tahun 1935, ekspor pinang bertambah hingga dua puluh tujuh ribu ton dan di tahun 1939 meningkat menjadi dua puluh lima ribu ton dengan nilai penjualan lima *gulden* setiap seratus kilogram (Langhout, 1923: 127).

Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada penanaman kelapa. Pada permulaan abad ke-20, Belanda memerintahkan masyarakat supaya menanam kembali tanaman kelapa di perkebunan yang masih kosong. Untuk mempermudah pembiayaan penanaman kelapa, pemerintah Belanda memberikan pinjaman kredit nol bunga kepada petani. Daerah yang menarik banyak perhatian untuk peremajaan dan menanam kelapa ialah sekitar Banda Aceh, Sabang, pantai barat Aceh, seperti Meulaboh, Singkil, dan Calang. Luas kebun kelapa di Aceh mencapai wilayah seluas 1.000 hektar (Koloniaal Verslag, 1905: 21.)

Akibat meluasnya penanaman kelapa, produksi kopra Aceh meningkat drastis. Kopra tersebut kemudian dikirim ke berbagai negeri, seperti Penang, Malaya, dan Eropa. Hasil produksi kopra terus meningkat setiap tahunnya, misalnya, di tahun 1919, Aceh mengekspor kopra sebanyak enam ribu ton.

Namun, selama 1920 ekspor kopra menurun hingga empat ribu ton (Jongejans, 1939: 158). Menurun ekspor kopra terjadi karena harga kopra yang fluktuatif dan cenderung merosot, sehingga memengaruhi para petani untuk memproduksi lebih banyak lagi menjadi kurang bergairah. Hal itu berakibat pada semakin sedikit hasil produksi kopra, misalnya, selama 1939, kopra Aceh yang dikirim ke luar berjumlah dua belas ribu seratus lima puluh ton yang nilai jualnya sekitar 3.50 gulden setiap 100 kilogram (Sufi, 199: 6).

Di samping upaya meningkatkan hasil produksi di bidang pertanian masyarakat, kolonial turut pula meningkatkan produksi tanaman budi daya para petani. Pemerintah membantu tanaman budi daya masyarakat dengan cara mengundang perusahaan-perusahaan Eropa, seperti *Ondernemingslandbouw* supaya membantu modal usaha bagi masyarakat Aceh di bidang perkebunan. Belanda juga memberikan bantuan usaha kepada masyarakat dengan cara menyediakan lahan perkebunan dan pertanian sekitar enam belas ribu tujuh ratus hektar, sedangkan bagi rakyat Aceh yang ingin mengusahakan hutan disediakan sejumlah 21 tanah konsesi semenjak tahun 1907 (Sufi, 1999: 7). Selain bantuan lahan, pihak Belanda juga memberikan penyuluhan mengenai tata cara bertani dan berkebun yang baik, seperti dengan membangun lahan untuk tanaman karet di sekitar wilayah Aceh Timur (Langhout, 1923: 90).

Pertumbuhan investasi orang Eropa di bidang usaha berkebun di Aceh sangat terkait dengan keadaan daerah Aceh yang semakin aman. Wilayah-wilayah yang keamanannya tergolong baik, pekerjaan di bidang perkebunan berlangsung dengan baik pula, tetapi sebaliknya bagi wilayah yang masih banyak gangguan keamanannya belum dapat dilakukan dengan baik. Wilayah tengah dan tenggara Aceh baru diizinkan untuk membuka usaha perkebunan setelah wilayah-wilayah itu mulai kondusif. Daerah yang paling banyak

usaha perkebunan milik pemerintah Belanda dan swasta Barat adalah wilayah Aceh bagian timur.

Banyak perusahaan perkebunan orang Eropa di wilayah timur Aceh, seperti (1). *De Bajan Sumatra Rubber Maatschappij*, mulai beroperasi pada sekitar Mei 1911 yang persediaan dana awal sebanyak f. 1.000.000 dengan jumlah lahan sekitar seribu tujuh ratus hektar. (2). *Naamlooze Vennotschap Langsarlandsyndicaat*, mulai beroperasi pada sekitar Agustus 1910 yang dana persediaan awal sebanyak f. 500.000 mencakup areal seluas sekitar lima juta empat ratus enam puluh ribu hektar. (3). *Langsa Sumatra Rubber Maatschappij*, mulai beroperasi sekitar Juni 1910 dengan dana awal sebanyak f. 1.500.000. (4). *Rubber Cultuur Maatschappij Soengey Raja*, mulai beroperasi pada sekitar Oktober 1909 yang persediaan dana awal sebanyak f. 2.000.000 mencakup areal seluas seratus delapan puluh empat hektar. (5). *Batang Ara Cultuur Mij*, mulai dibangun pada sekitar Januari 1911 yang persediaan dana awal sebanyak f. 500.000. (6). *Soengei Lipoet Cultuurmaatschappij*, dibangun pada sekitar Februari 1908 yang persediaan dana awal berjumlah f. 750.000 dengan jumlah areal seribu lima ratus hektar. (7). *Tamiang Rubber Estates Limited*, mulai beroperasi pada sekitar September 1909 yang persediaan dana awal berjumlah f. 120.000, dengan jumlah areal 4.752 Ha (Langhout, 1923: 90).

Jumlah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan swasta Belanda pada tahun 1923 sebanyak 20 buah. Dari total perkebunan tersebut, dua belas buah areal karet, tujuh areal sawit, dan satu areal kelapa. Selain perkebunan milik perusahaan swasta Belanda, terdapat pula perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh negara Francis dan negara Belgia, yaitu *Soc Fin* di sekitar Kuala Simpang atau Tamiang yang berdekatan dengan wilayah Sumatera Utara. Perusahaan itu mulai beroperasi pada sekitar Februari 1908 yang luas lahannya sekitar tiga

puluh hektar. Perusahaan-perusahaan tersebut terus memperluas lahan untuk perkebunan, misalnya pada 1922 bertambah sekitar lima ribu tujuh ratus lima puluh satu hektar dan para pekerjanya berjumlah 3.600 orang. Perkebunan itu tidak hanya untuk tanaman karet, tetapi juga bagi tanaman kopi dan tanaman sawit (Van Eijbergen, 1914: 188).

Di wilayah pantai barat Aceh, pemerintah Belanda juga membangun beberapa *ondernemings landbouw* yang mengusahakan perkebunan karet dan sawit. Pada tahun 1934, pemerintah Belanda membuka perkebunan di daerah Meulaboh dan sekitarnya dengan menanam karet sebanyak 400.000 pohon (Langhout, 1923: 188). Perkebunan sawit di daerah pantai barat Aceh dikuasai oleh perusahaan *Handelsverreemging Amsterdam* dan *Societe Financiere des Caoutschoucs*. Semenjak tahun 1937, luas lahan tanaman sawit di wilayah itu berjumlah 11.325 Ha yang hasilnya dapat diperoleh sekitar 8.835,5 ton (Smeets, 9 Mei 1934).

Ketika wilayah Aceh Tengah dapat ditaklukkan pada tahun 1908 maka perusahaan Eropa langsung membuka perkebunan kopi. Mereka lebih suka menanam jenis kopi robusta, karena dinilai hasilnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan kopi jenis lain. Areal perkebunan kopi di daerah Aceh Tengah yang terkenal berada di Lampahan dengan areal tanah seluas 100 hektar dan dapat memperoleh hasil sekitar tujuh puluh lima ton setiap tahun. Hasil tersebut setiap tahun meningkat sampai 225 ton. Hasil perkebunan dari Aceh Tengah terus meningkat, misalnya, di tahun 1937 bertambah hingga 598 ton dengan lahan seluas 2.400 hektar. Wilayah Aceh Tenggara arealnya sangat sesuai untuk ditanami kopi. Perkebunan di daerah itu dikuasai oleh para pemilik modal negeri Belanda. Produksi kopi di seluruh Aceh dikirim bagi kebutuhan di daerah Sumatera, kemudian sebagiannya dikirim ke negara Eropa. Di Aceh bagian tengah, di samping kopi juga ditanam pohon pinus merkusi yang lahannya hingga berjumlah

70.000 hektar (Jongejans, 1939: 162).

Pada penghujung tahun 1939, di semua wilayah Aceh ada sekitar 133 buah perusahaan di bidang perkebunan budi daya. Jumlah lahan yang dimiliki oleh setiap perusahaan mencapai 2.000 hektar. Luas lahan untuk berbagai jenis tanaman sebagai berikut: untuk lahan tanaman karet sekitar 34.060 hektar, untuk lahan tanaman sawit 11.325 hektar, lahan tanaman kopi sekitar 2.745 hektar, lahan untuk tanaman teh serta tanaman pinus merkusi berjumlah 70.000 hektar. Dengan adanya pengusaha negara Eropa di bidang perkebunan di Aceh, sangat berpengaruh pada sistem pertanian masyarakat setempat. Cara menanam pohon karet yang dilakukan oleh perusahaan negara Eropa di Aceh, diikuti pula oleh masyarakat untuk menanam pohon karet di lahan yang mereka miliki (Piekaar, 1949: 27).

Kehadiran *landbouwvoorlichtingsdienst* dengan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan penerangan mengenai tata cara bertani dengan baik kepada masyarakat Aceh dan atas kesuksesannya membuat contoh perkebunan yang baik, sehingga bertambah simpati dari masyarakat Aceh. Keberhasilan perkebunan yang dijadikan contoh untuk pohon kopi di wilayah Kabupaten Pidie, sangat berpengaruh pada masyarakat di tempat itu dan daerah lain yang bedekatan dengannya. Masyarakat juga ikut berkebun kopi di lahan yang mereka miliki sendiri. Perkebunan kopi yang dikerjakan oleh masyarakat Aceh juga berhasil dengan baik, terutama setelah diberikan bantuan oleh para bangsawan yang ada di daerahnya. Keberhasilan pertanian kopi di daerah Kabupaten Pidie menyebabkan masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut turut menanam kopi di areal perkebunan mereka.

Di samping itu, pemerintah Belanda juga mengusahakan pertambangan minyak di wilayah timur dan utara Aceh. Pengeboran percontohan dilakukan di wilayah Peureulak, Aceh Timur sekitar tahun 1900 dan tahun

1902, serta pada tahun 1903 di wilayah Langsa, Peudada, Idi, Julok Rayeuk, serta Cunda (Schtolten, 5 Desember 1933). Untuk itu, di wilayah tersebut didirikan banyak perusahaan perminyakan, misalnya Holland Perlak Maatschappij, Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), Perlak Petroleum Maatschappij, Petroleum Mij Zuid Perlak, serta Nederland Koninklijk Petroleum Maatschappij (NKPM). Perusahaan perminyakan yang sangat aktif beraktivitas di bidang perminyakan ialah perusahaan BPM. Perusahaan itu mendapat lahan yang paling luas yang terdiri atas wilayah Aceh Timur, Tamiang, Aceh Utara, dan Jambo Aye. Lahan itu didapatkan atas pemberian dari pemerintah Belanda selama periode tahun 1927. Atas keberhasilan yang dilakukan oleh perusahaan BPM maka pada sekitar September 1930 memperoleh kembali lahan dari pemerintah kolonial (Jongejans, 1939: 201--202).

BPM yang memiliki konsesi petak Tamiang dengan sumur Rantau mendapatkan keuntungan yang banyak. Petak ini merupakan pusat penghasil minyak yang terbesar dan paling produktif dengan produksi rata-rata 1.700 ton setiap hari (Gunther, 1 November 1933). Pada tahun 1929, hasil minyak dari perusahaan BPM di wilayah Kuala Simpang, Aceh Timur dan sekitarnya berjumlah 61.698 M3, kemudian pada tahun 1933 bertambah sebanyak 727.267 M3. Minyak yang berasal wilayah Aceh, seperti Aceh Timur dan Kuala Simpang disalurkan dengan pipa sepanjang 120 km ke Pangkalan Brandan, Sumatera Utara untuk disuling (de Boer, Juli 1927).

Hasil minyak yang banyak tersebut memberikan keuntungan besar pada pemerintah Belanda dan wilayah-wilayah penghasil minyak yang ada di Aceh. Pada tahun 1934, pemerintah Belanda memutuskan bahwa wilayah yang ada minyak memperoleh hasil dari perusahaan pertambangan. Daerah-daerah yang mendapatkan hasil dari perusahaan perminyakan di antaranya Kuala Simpang, Langsa, Idie, dan Perlak. Akibatnya,

di wilayah-wilayah tersebut rakyat menjadi makmur dan sejahtera.

Perusahaan minyak swasta Eropa yang beroperasi di Aceh mengembangkan pula usahanya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Jawa. Untuk itu, di Aceh banyak terdapat produk yang didatangkan dari daerah tersebut, di antaranya gula dan semen. Namun, pemerintah Belanda mengirimkannya pula berbagai komoditas dari Aceh ke daerah tersebut untuk diolah dan diekspor, di antaranya kopra, damar, dan karet. Hasil produksi yang melimpah tersebut lebih banyak dirasakan oleh daerah-daerah baru yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Daerah-daerah baru yang dibangun oleh pemerintah Belanda, misalnya, Padang pada tahun 1660 dan Bengkulu yang dibangun oleh Inggris. Pemerintah Inggris membangun pula kota Penang di Semenanjung Malaya pada sekitar tahun 1786 dan kota Singapura pada tahun 1819. Akan tetapi, kota yang banyak memperoleh manfaat dari hasil komoditas Aceh adalah kota Penang. (Anderson, 1970: 161, 166).

Dampak Pendidikan

Sistem pendidikan Barat sangat terlambat masuk ke Aceh, yaitu pada awal abad ke-20, di wilayah lain di Indonesia seperti di Pulau Jawa sudah diterapkan sistem pendidikan Barat jauh sebelumnya. Di antara hal yang menyebabkan pihak Belanda menerapkan model pendidikan Barat di Aceh, *pertama*, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan politik etis, yaitu supaya tersedia pekerja yang berkompeten pada bagian administrasi birokrasi Belanda. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah Belanda juga menerapkan sistem pendidikan tersebut kepada masyarakat pribumi pada umumnya. *Kedua*, sebagai tindak lanjut dari saran Christian Snouck Hurgronje bahwa perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda disebabkan oleh nilai ajaran Islam (Benda, 1958: 99). Untuk menghadapi atau meredam

perjuangan rakyat Aceh terhadap Belanda dapat dilakukan dengan cara merangkul golongan bangsawan dan menjauhkan para pemimpin agama dengan rakyat Aceh.

Dalam melaksanakan sistem pemerintahan di Aceh, pemerintah Belanda memanfaatkan golongan *uleebalang* (bangsawan) yang ada di setiap daerah. Golongan *uleebalang* dijadikan sebagai penghubung antara pemerintah Belanda dengan rakyat Aceh. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah Belanda terlebih dahulu memperkenalkan model pendidikan Barat kepada golongan bangsawan. Selain itu, juga diharapkan bahwa golongan bangsawan itu sendiri yang memisahkan rakyat dengan pemimpin agama.

Kebijakan tentang sistem pendidikan itu mulai ditindaklanjuti oleh pemerintah Belanda pada tahun 1900. Semenjak tahun tersebut, pemerintah Belanda mulai memperkenalkan model pendidikan Barat kepada golongan bangsawan. Golongan bangsawan pertama yang direkrut ke sistem pendidikan tersebut adalah keluarga bangsawan dari wilayah Aceh Timur atau tepatnya daerah Idie Rayeuk. Mereka dikirim ke Banda Aceh untuk menjalani pendidikan pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak hanya menyekolahkan keluarga bangsawan Aceh di Banda Aceh, tetapi juga mengirimkannya ke berbagai sekolah Belanda di luar Aceh, seperti ke Bukittinggi, Sumatera Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, misalnya, selama tahun 1907 hingga 1920-an banyak keluarga bangsawa yang dikirim ke Pulau Jawa, seperti Bandung, Serang, Madiun, Batavia, dan Asahan Sumatera Utara.

Selain memperkenalkan sistem pendidikan Barat kepada keluarga bangsawan, pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah untuk masyarakat Aceh pada umumnya. Namun, tujuannya untuk memperoleh orang yang dapat bekerja pada pemerintah Belanda. Selain itu, juga dimaksudkan untuk membendung dominasi tokoh agama yang selama ini dijadikan panutan oleh masyarakat

dan sebagai penggerak masyarakat untuk melawan Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mendirikan berbagai sekolah rendah atau di Aceh lebih dikenal dengan nama Sekolah Mukim (Koloniaal Verslag, 1908: 13). Sekolah Mukim atau di Jawa disebut Sekolah Desa yang disediakan oleh pemerintah Belanda sangat terbatas. Di Aceh hanya dibangun beberapa jenis pendidikan, di antaranya *Volkschool* (dengan masa belajar tiga tahun), *Vervolgschool* (masa belajar dua atau tiga tahun), *Meisjesschool* (masa belajar dua atau tiga tahun), *De 2de klasseschool* (sekolah-sekolah kelas dua dengan masa belajar dua tahun), *Inlandsche School* (Sekolah Melayu), *Europeesche Lager School (ELS)*, *Hollandsch Inlandsche School (HIS)*, *Hollandsche Chinesche School* (khusus untuk anak-anak orang Cina), serta *Hollandsche Ambonsche School* (khusus untuk anak-anak orang Ambon yang bekerja pada militer Belanda di Aceh) (Mailr, 17 Juni 1935).

Pada umumnya, orang yang mengajar di Sekolah Mukim tidak dapat berbahasa Aceh, sebaliknya anak-anak yang belajar di sekolah tersebut tidak dapat berbahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Oleh karena itu, tidak semua putra-putri orang Aceh mau belajar di sekolah Belanda tersebut. Keadaan yang demikian itu menjadi masalah besar yang dihadapi pemerintah Belanda dalam menjalankan sistem pendidikannya di Aceh. Oleh karena itu, pada tahun 1931 pemerintah Belanda menetapkan bahasa Aceh dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada sekolah Belanda (Jongejans, 1939: 254). Namun, bagi daerah yang masyarakatnya tidak menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa ibu maka bahasa pengantar di sekolah menggunakan bahasa Melayu (Jongejans, 1939: 254).

Masalah lain yang dihadapi oleh pemerintah Belanda di Aceh adalah para tokoh agama melarang putri-putri Aceh belajar pada sekolah Belanda yang mereka

anggap dibangun oleh orang kafir. Tidak hanya tokoh agama yang melarang anak-anak Aceh belajar pada sekolah Belanda, tetapi juga para orang tua siswa karena dianggap sebagai sekolah buatan orang kafir. Dengan demikian, sangat banyak putra-putri orang Aceh yang tidak bersekolah dan mereka lebih senang membantu orang tuanya di kebun dan sawah (Koloniaal Verslag, 1909: 14-15). Dalam masalah pendidikan, para orang tua lebih senang menyerahkan anaknya kepada ulama atau pada lembaga *dayah* (pesantren) yang ada di kampungnya untuk belajar agama (Alfian, 1987: 47).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak Belanda menempuh berbagai cara, di antaranya dengan meminta bantuan para bangsawan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa sistem pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Belanda itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, pemerintah Belanda juga memasukkan pelajaran agama Islam dan bahasa Aceh dalam kurikulum pendidikan sekolah dan menurunkan biaya pendidikan (*Mailr*, 545/09). Demikian pula dengan waktu belajar, disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, misalnya, pada hari Jumat dan bulan Ramadan sekolah diliburkan serta belajar siang hanya sampai pukul 11.30 WIB, karena ada waktu salah zuhur (*Mailr*, 545/09).

Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar, pemerintah Belanda mendirikan sekolah guru di Banda Aceh pada tahun 1909. Namun, sekolah tersebut baru beroperasi pada 7 Februari 1910. Siswa angkatan pertama yang mengikuti pendidikan guru pada sekolah tersebut berjumlah 12 orang (Koloniaal Verslag, 1910: 12).

Untuk menarik siswa supaya mau belajar pada sekolah rendah, Belanda mengerahkan *controleur* dan bangsawan supaya memerintahkan masyarakat Aceh untuk mengantarkan putra-putrinya bersekolah pada sekolah rendah. Apabila ada orang tua yang menolak mengantarkan anaknya

bersekolah pada sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda, mereka dihukum dengan kerja paksa pada proyek pemerintah (Kremer, 1923: 160). Untuk tujuan tersebut, para *controleur* dan bangsawan melakukan berbagai intimidasi kepada para orang tua siswa supaya mengirimkan anaknya ke sekolah Belanda. Akibat dari berbagai intimidasi tersebut, banyak orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya pada sekolah Belanda (*Mailr*. 3225/20).

Para cendekiawan Aceh tidak setuju dengan maksud pemerintah Belanda yang menerapkan bahasa Aceh sebagai bahasa pengantar di sekolah pemerintah, meskipun telah disampaikan penjelasannya. Mereka beranggapan bahwa pemerintah Belanda menghambat pertumbuhan bahasa Melayu di daerah Aceh, padahal bahasa tersebut sangat penting bagi pengembangan perekonomian rakyat dan dalam menjalin hubungan dengan berbagai etnis yang ada di Aceh. Namun, pemerintah Belanda tetap menerapkan kebijakannya, bahkan pada 1 Juli 1932 ditetapkan sebagai waktu dimulainya penggunaan bahasa Aceh di sekolah, kecuali beberapa wilayah yang telah disebutkan di atas yang tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar (*De Deli Courant*, Januari 1933).

Meskipun sistem pendidikan Barat sangat terlambat diterapkan di Aceh dan banyak tantangan yang dihadapi, tetapi perkembangannya sangat cepat, misalnya, pada tahun 1920, sekolah desa di seluruh Aceh sebanyak 266 buah, 527 orang guru, dan 16.435 orang murid. Jumlah tersebut terus meningkat, pada tahun 1921 jumlah sekolah 275 buah, 539 orang tenaga pengajar, dan 16.674 orang murid (*Algemeen Verslag*, 1924: 123). Selanjutnya, setahun kemudian peningkatan jumlah sekolah, guru, dan murid terus terjadi, yaitu pada tahun 1922 jumlah sekolah sebanyak 287, 553 tenaga pengajar, dan 16.991 orang murid (Aken, 1936: 136). Dalam laporan pelaksanaan pemerintahan

selama A. Ph. van Aken menjabat sebagai Gubernur Aceh dan Daerah Taklukannya, disebutkan bahwa pada tahun 1939 jumlah sekolah menjadi 321 buah dan 33.553 orang murid. Bahkan pada penghujung kekuasaan Belanda di Aceh, terutama pada tahun 1939, masih terjadi penambahan jumlah sekolah, guru, dan murid, yaitu 348 buah sekolah, 600 orang tenaga pengajar, dan 36.000 siswa (Piekaar, 1949: 29).

Dampak terhadap Perjuangan Rakyat Aceh

Selama pelaksanaan politik pasifikasi di Aceh, banyak kaum bangsawan yang beralih bekerja sama dengan pihak Belanda. Hal itu ditandai dengan banyaknya kaum bangsawan yang menandatangani *korte versklaring*, yaitu pernyataan takluk kepada pemerintah Belanda. Hal yang sama juga terjadi pada sikap rakyat Aceh dalam melawan penjajahan Belanda, yaitu semakin melemah karena sudah jarang melakukan perjuangan secara gerilya dan pembunuhan secara nekat terhadap orang Belanda. Sebagian masyarakat mulai membiarkan terhadap semua kebijakan pemerintah Belanda. Golongan bangsawan yang mau bekerja sama dengan pihak Belanda diangkat menjadi pegawai dan digaji setiap bulannya.

Namun, dalam kenyataannya, perang melawan Belanda terus berlangsung, bahkan tidak pernah berhenti hingga Belanda meninggalkan Aceh pada tahun 1942. Hal itu terjadi karena sebagian bangsawan, ulama, dan rakyat tetap tidak mau tunduk kepada Belanda. Oleh karena itu, G.B. Hooyer (penulis Belanda), menyebutkan bahwa perang Aceh merupakan yang terdahsyat di Nusantara, bahkan di dunia dan perang Aceh menjadi pelajaran yang berharga bagi serdadu Belanda. Pernyataan yang hampir sama disebutkan oleh Paul Van't Veer (penulis Belanda), bahwa perang Aceh merupakan perang yang paling besar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Belanda.

Menurutnya, perang Aceh dapat disamakan dengan perang 80 tahun. Begitu juga jumlah korban harta dan jiwa kedua belah pihak sangat banyak; lebih 100.000 orang tewas (Alfian, 1987: 278). Oleh Karena itu, walaupun tampaknya politik pasifikasi berhasil dalam beberapa aspek, namun Belanda tidak mampu menguasai Aceh sepenuhnya sebab dalam kenyataannya, Belanda tidak pernah merasa aman di Aceh.

Apa yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada mulanya sulit di terima, tetapi dalam perkembangan dan kenyataannya, berbagai unsur budaya itu terserap juga ke dalam masyarakat Aceh. Akibatnya, timbul gejala adanya kegoncangan sistem tata nilai masyarakat Aceh. Ada masyarakat yang menerima dan mendukung sistem Barat tersebut. Namun, selain segi-segi yang mereka anggap tidak membawa kebaikan bagi rakyat Aceh, tetap ada segi baiknya, yaitu muncul golongan intelektual Aceh akibat pendidikan Belanda.

Golongan intelektual membawa dampak pada bentuk perjuangan rakyat Aceh. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Aceh selama tahun 1900--1942 terjadi dalam dua cara, yaitu melalui perlawanan fisik dengan berperang secara bergerilya dan melalui jalur politik dengan mendirikan berbagai organisasi sosial dan politik serta sekolah-sekolah swasta dan madrasah yang modernis.

PENUTUP

Politik pasifikasi Belanda membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat Aceh. Perekonomian dan pendidikan di wilayah Aceh terus membaik semenjak diterapkan politik tersebut. Selain itu, wilayah Aceh menjadi semakin aman dan terkendali. Kehidupan sosial-budaya masyarakat yang terpuruk karena sibuk berperang menjadi semakin membaik. Kesejahteraan masyarakat juga semakin membaik karena hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan selalu meningkat. Masyarakat Aceh sudah dapat

membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara yang modern. Demikian juga para bangsawan, kesejahteraannya semakin meningkat. Masyarakat Aceh sudah mengenal pula sistem perekonomian Belanda dalam bentuk ekonomi ekplotasi. Demikian juga pendidikan, selalu terjadi peningkatan, baik jumlah guru dan murid maupun gedung sekolah, sehingga muncul golongan menengah dan ilmuwan Aceh yang dihasilkan dari sistem pendidikan Belanda. Golongan menengah dan berpendidikan itu mulai menyadari bahwa nasib masyarakat Aceh sedang tertindas. Mereka merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan beragama dan berbangsa, sehingga berusaha membebaskannya dari cengkraman penjajah Belanda, apalagi mereka sudah mengenal taktik dan strategi perjuangan menuju kemerdekaan.

Sikap masyarakat Aceh terhadap kebijakan politik pasifikasi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda tidak sama. Golongan bangsawan banyak yang mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, meskipun ada juga yang tetap berperang melawan Belanda. Demikian pula dengan golongan ulama, ada yang tunduk kepada penjajah Belanda dan ada juga tetap berjuang melawannya. Masyarakat pada umumnya juga mengambil sikap yang sama dengan golongan bangsawan dan ulama, yaitu ada di antara masyarakat yang tunduk kepada penjajah Belanda dan ada pula dari mereka yang terus berjuang melawan penjajah Belanda. Dengan demikian, meskipun secara umum politik pasifikasi berpengaruh pada peningkatan perekonomian, pendidikan, dan perjuangan rakyat Aceh, tetapi Belanda tidak dapat menundukkan Aceh semuanya, karena sebagian rakyat tetap tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan terus melakukan perlawanan.

Penelitian ini masih memiliki kelemahan, di antaranya belum diteliti secara rinci pengaruh pendidikan terhadap lahirnya gerakan nasionalisme di Aceh. Oleh

karena itu, menimbulkan pertanyaan penting bagaimana hubungan pendidikan dengan munculnya berbagai gerakan nasionalisme di Aceh? Kelemahan-kelemahan tersebut dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut. Mengingat krusial temuan penelitian ini maka pembuat kebijakan perlu mengetahui bahwa penyelesaian keamanan di Aceh jangan dilakukan dengan mengedepankan kekerasan. Dari berbagai peristiwa berkaitan dengan keamanan di Aceh tidak ada yang berhasil dengan kekerasan. Oleh karena itu, belajarlah dari sejarah karena sejarah mengajarkan kita supaya lebih bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aken, A. Ph. *Memorie van Overgave* Februari 1936, *Mailr* 504/36.
- Alfian, T. Ibrahim. 1987. *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Algemeen Verslag van Het Onderwijs in Nederlandsch-Indie over 1921 en 1922*. 1924. Weltevreden: Landsdrukkerij.
- Benda, Harry J. 1958. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Under the Japanese Occupation 1942-1945*. The Hague and Bandung: Van Hoeve
- De Deli Courant*, Januari/Juni 1933) (Surat Kabar Deli yang terbit di Medan).
- Anderson, Jhon. 1970. *Acheen and the Port on the North and the East Coast of Sumatra*, Oxford University Press.
- Geerts, G.A. 2007. *Bezoekersgids Militaire Erebegraafplaats Peutjut*. Banda Aceh: Uitgave van de Stichting Peutjut-Fonds.
- Gunther, Th. O.B. 1933. *Memorie van Overgave van den Controleur van Tamiang*, 1 November 1933.
- James, K.A. 1922. "De Pepercultuur ter Oostkust van Atjeh", *Koloniale Studien*. Weltevreden : G. Kolff & Co..
- Jongejans, J. 1939. *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*. Baarn: Holland Drukkerij.

- Koloniaal Verslag*, 1905; 1907; 1908; 1909; 1910;
- Kreemer, J. 1923. *Atjeh II*, Leiden: E.J. Brill.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka
- Langhout, J. 1923. *Economische Staatkunde in Atjeh*. Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.
- Mailr (Mail Rapporten)*, 2398/18; 1924-1932; 17 Juni 1935; 545/09; 3225/20. Kementerian Dalam Negeri Belanda, Den Haag.
- Piekaar, A.J. 1949. *Atjeh en de Oorlog met Japan*. The Hague: van Hoeve.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sufi, Rusdi. 1999. "Mengamankan Aceh Melalui Perbaikan Ekonomi" dalam *Bulletin Haba No. 10 99*, (Banda Aceh : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, hlm. 4--11.
- Sufi, Rusdi dkk.,. 2008. *Aceh Tanah Rencong*. Badan Aceh: Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Schtolten, P. 1933. *Memorie van Overgave van OnderafdeelingLameulo*, 5 Desember 1933.
- Smeets, A. Th. 1934. *Memone van Overgave van Onderafdeeling Meulaboh*, 9 Mei 1934.
- Struyvenberg, A. (1930). *Het Korps Marechaussee 1890-1930*. Kutaradja: tanpa nama penerbit.
- Van Eijbergen. 1914. "Atjeh up to Date", *Tijdschrift Voor Met Binnenlandsch Bestuur*. Batavia: G. Kolff & Co.
- Veer, Paul Van't. (1985). *Perang Aceh*. Jakarta: Grafiti Pers.